

Demokrasi pancasila dan tantangan partisipasi politik generasi z di Indonesia

Abid Alfares

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250501110015@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Demokrasi pancasila; generasi z; partisipasi politik; literasi politik; media sosial.

Keywords:

Pancasila democracy; generation z; political participation; political literacy; social media.

ABSTRAK

Demokrasi Pancasila sebagai sistem politik yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia terus menghadapi tantangan serius di tengah arus perubahan sosial yang didorong oleh globalisasi dan revolusi digital. Generasi Z, yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, kini menjadi kelompok pemilih terbesar dalam pemilu Indonesia, termasuk Pemilihan Presiden 2024, namun partisipasi politik mereka masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara potensi dan keterlibatan nyata. Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara nilai-nilai demokrasi Pancasila dan dinamika partisipasi politik Generasi Z, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang yang ada.

Melalui pendekatan studi literatur terhadap enam sumber akademik yang relevan, kajian ini menemukan bahwa rendahnya literasi politik, pengaruh negatif media sosial, fenomena filter bubble, serta apatisme politik menjadi faktor penghambat utama. Di sisi lain, kemudahan akses informasi digital, relevansi isu-isu kontemporer, dan potensi pendidikan politik berbasis teknologi membuka ruang strategis untuk meningkatkan keterlibatan Generasi Z. Artikel ini berargumen bahwa internalisasi nilai demokrasi Pancasila melalui pendidikan karakter, pemanfaatan platform digital secara konstruktif, serta penguatan literasi politik merupakan langkah integratif yang diperlukan agar Generasi Z dapat berperan sebagai agen perubahan demokrasi yang bertanggung jawab dan berwawasan kebangsaan.

ABSTRACT

Pancasila democracy, as a political system rooted in the noble values of the Indonesian nation, continues to face serious challenges amid the tide of social change driven by globalization and the digital revolution. Generation Z, born between 1997 and 2012, is now the largest voter group in Indonesian elections, including the 2024 Presidential Election; however, their political participation still reveals a significant gap between potential and actual engagement. This article aims to analyze the relationship between the democratic values of Pancasila and the dynamics of Generation Z's political participation, as well as to identify existing barriers and opportunities. Through a literature review of six relevant academic sources, this study finds that low political literacy, the negative influence of social media, the filter bubble phenomenon, and political apathy are the primary barriers. On the other hand, easy access to digital information, the relevance of contemporary issues, and the potential for technology-based political education open strategic avenues for increasing Generation Z's engagement. This article argues that the internalization of Pancasila democratic values through character education, the constructive use of digital platforms, and the strengthening of political literacy are the integrative steps needed for Generation Z to serve as responsible agents of democratic change with a national perspective.



Pendahuluan

Setiap negara yang menganut sistem demokrasi menempatkan partisipasi warga negara sebagai fondasi utama legitimasi kekuasaan. Di Indonesia, prinsip tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam kerangka Demokrasi Pancasila yang mengedepankan nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial. Sejak reformasi tahun 1998, ruang demokrasi di Indonesia semakin terbuka lebar, ditandai dengan pemilu langsung, kebebasan pers, dan desentralisasi kekuasaan (Sarjiyati et al., 2025). Namun di tengah kemajuan tersebut, muncul pertanyaan mendasar; sejauh mana generasi penerus bangsa, khususnya Generasi Z, benar-benar memahami dan menghayati nilai-nilai demokrasi yang menjadi identitas bangsa?.

Generasi Z, yang secara umum didefinisikan sebagai mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, memiliki karakteristik unik sebagai generasi yang tumbuh bersama perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Mereka adalah generasi pertama yang mengalami dunia digital sejak dini, akrab dengan berbagai platform media sosial, dan terbiasa mengakses informasi secara instan. Dalam konteks Pemilihan Presiden 2024, Generasi Z menyumbang sekitar 22,85 persen dari total Daftar Pemilih Tetap, atau sekitar 46,8 juta jiwa, menjadikan mereka kelompok demografis yang secara politis tidak bisa diabaikan (Mataram et al., 2024)

Di sisi lain, potensi besar ini tidak serta-merta berbanding lurus dengan tingkat kesadaran dan keterlibatan politik yang memadai (Zaman, 2023b). Berbagai studi menunjukkan bahwa Generasi Z menghadapi hambatan serius dalam membangun relasi yang sehat dengan dunia politik. Fenomena apatisme, rendahnya kepercayaan terhadap sistem politik, hingga pengaruh disinformasi di media sosial menjadi tantangan nyata yang perlu diatasi secara sistematis (Zaman, 2023a). Sementara itu, nilai-nilai Demokrasi Pancasila yang mengedepankan kebersamaan dan partisipasi kolektif justru menjadi modal dasar yang bisa dioptimalkan untuk menjawab tantangan tersebut.

Kajian mengenai hubungan antara Demokrasi Pancasila dan partisipasi politik Generasi Z menjadi relevan sekaligus mendesak. Bukan hanya karena besarnya proporsi pemilih muda dalam setiap pemilu, tetapi juga karena keberlanjutan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai kebangsaan berhasil diinternalisasikan oleh generasi penerus. Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut dengan menganalisis dinamika partisipasi politik Generasi Z, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta strategi yang dapat ditempuh untuk memperkuat keterlibatan mereka dalam proses demokrasi berbasis nilai-nilai Pancasila.

Pembahasan

Demokrasi Pancasila sebagai Kerangka Nilai Partisipasi Politik

Demokrasi Pancasila bukan sekadar sistem pemilihan umum, melainkan sebuah filosofi bernegara yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata 'demos' (rakyat) dan 'kratos' (kekuasaan), yang bermakna pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Namun dalam konteks Indonesia, pengertian ini diperkaya dengan dimensi spiritual dan kebersamaan yang tercermin

dalam sila-sila Pancasila, khususnya sila keempat mengenai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (Dan et al., 2024).

Nilai-nilai ideal Pancasila sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa mencakup lima dimensi utama, yaitu ketuhanan yang berkebudayaan, kemanusiaan universal, persatuan dalam kebhinekaan, demokrasi permusyawaratan, serta keadilan sosial. Kelima dimensi ini bukan entitas yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang saling memperkuat. Dalam kerangka tersebut, partisipasi politik bukan dipahami semata-mata sebagai hak individu untuk memilih, tetapi juga sebagai kewajiban moral untuk turut serta dalam pembentukan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup bersama.

Demokrasi Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip musyawarah dan keadilan sosial. Demokrasi dalam konteks ini tidak hanya menekankan pada kebebasan individu, tetapi juga pada keseimbangan antara hak dan kewajiban serta kepentingan bersama (Faslah, 2024).

Prinsip Teo-Demokratis yang dikemukakan Cholisin menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak memisahkan antara nilai-nilai ketuhanan dan tata kelola pemerintahan. Semua kebijakan dan keputusan dirumuskan untuk kepentingan rakyat, namun tetap dalam koridor norma yang lebih tinggi. Inilah yang membedakan Demokrasi Pancasila secara mendasar dari model demokrasi liberal yang lebih individualistis dan sekuler. Pemahaman ini penting karena memberikan basis nilai yang kuat bagi setiap warga negara, termasuk Generasi Z, untuk memaknai keterlibatan politik bukan sebagai urusan pragmatis semata, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan yang bermakna.

Profil dan Karakteristik Generasi Z sebagai Aktor Politik

Memahami dinamika partisipasi politik Generasi Z tidak bisa dilepaskan dari pemahaman tentang siapa mereka sebagai generasi (Dan et al., 2024). mengidentifikasi tujuh karakteristik utama Generasi Z berdasarkan perspektif David Stillman, yaitu: *digital* (melampaui batas antara dunia nyata dan digital), *hiper-kustomisasi* identitas, *realistis*, rentan terhadap *FOMO (Fear of Missing Out)*, berorientasi kolaborasi dalam ekonomi (*weconomist*), mandiri (DIY), dan terpacu untuk berkontribusi. Karakteristik-karakteristik ini membentuk pola perilaku yang unik, termasuk dalam cara mereka mendekati dan merespons isu-isu politik.

Sebagai generasi yang tumbuh dalam ekosistem digital, Generasi Z memiliki kemampuan tinggi dalam mengakses dan memproses informasi dari berbagai sumber secara bersamaan. Platform seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp bukan sekadar sarana hiburan, tetapi juga menjadi ruang diskusi politik yang dinamis. Informan dalam penelitian (Mataram et al., 2024) di Desa Karang Tapen menggambarkan bagaimana Generasi Z aktif memanfaatkan media sosial untuk mencari informasi tentang calon presiden, mendiskusikan isu-isu kebijakan bersama rekan-rekan mereka, dan membentuk pandangan politik yang lebih kritis. Ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi besar sebagai instrumen pendidikan politik informal.

Namun demikian, karakteristik digital-native Generasi Z juga membawa kerentanan tersendiri. Ketergantungan yang tinggi pada gawai dan media sosial berpotensi mengikis kemampuan komunikasi interpersonal langsung, yang justru menjadi fondasi penting dalam proses musyawarah sebagaimana ditekankan dalam nilai Demokrasi Pancasila. Di samping itu, aksesibilitas informasi yang tidak terbatas membawa serta risiko paparan terhadap konten yang tidak terverifikasi, hoaks, dan narasi yang bersifat provokatif, yang dapat mendistorsi pemahaman mereka tentang realitas politik.

Faktor Pendorong Partisipasi Politik Generasi Z

Penelitian yang dilakukan di Desa Karang Tapen dalam konteks Pilpres 2024 memberikan gambaran konkret tentang faktor-faktor yang mendorong Generasi Z untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Setidaknya tiga faktor utama dapat diidentifikasi: kemudahan akses informasi melalui media sosial, relevansi program yang ditawarkan oleh kandidat, serta pengaruh lingkungan sosial dan komunitas (Mataram et al., 2024).

Faktor pertama, kemudahan akses informasi digital, memainkan peran sentral. Media sosial memungkinkan Generasi Z untuk mengikuti perkembangan isu-isu politik secara real-time dan mengaksesnya dari mana saja. Hal ini berbeda secara signifikan dengan generasi sebelumnya yang lebih bergantung pada media konvensional seperti koran, radio, dan televisi. Kecepatan dan kemudahan akses ini mendorong kesadaran politik yang lebih organik dan spontan.

Faktor kedua, relevansi program politik, juga menjadi penentu penting. Generasi Z cenderung tertarik pada kandidat atau partai yang menawarkan solusi konkret atas isu-isu yang secara langsung berdampak pada kehidupan mereka, seperti jaminan pendidikan, lapangan kerja, perubahan iklim, dan kesejahteraan sosial. Ini menunjukkan bahwa Generasi Z bukan generasi yang apatis secara inheren, melainkan generasi yang selektif dan menuntut relevansi dalam praktik demokrasi.

Adapun faktor ketiga, pengaruh sosial dari komunitas, juga tidak bisa diremehkan. Diskusi kelompok di antara sesama teman, baik secara langsung maupun melalui ruang digital, menjadi media pendidikan politik informal yang efektif. Ketika Generasi Z merasa bahwa suara dan pandangan mereka dihargai dalam diskusi semacam ini, motivasi untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi yang lebih formal pun ikut meningkat. Hal ini sejalan dengan semangat musyawarah dalam nilai-nilai Demokrasi Pancasila.

Tantangan: Apatisisme hingga Filter Bubble

Arus globalisasi membawa masuk berbagai ideologi dan nilai-nilai baru yang dapat mempengaruhi praktik demokrasi di Indonesia. Salah satu dampak yang terlihat adalah munculnya kecenderungan individualisme dan liberalisme yang tidak sepenuhnya sejalan dengan karakter bangsa Indonesia.

Generasi Z menghadapi hambatan struktural dan kultural yang tidak ringan. Salah satu hambatan paling mendasar adalah fenomena apatisisme politik yang bersumber dari ketidakpercayaan terhadap sistem dan para pelaku politik. Sebagian Generasi Z merasa

bahwa suara mereka tidak akan membawa perubahan berarti, sehingga lebih memilih untuk tidak terlibat, bahkan cenderung golput (Mataram et al., 2024).

Hambatan lain yang tidak kalah serius adalah pengaruh negatif media sosial. Meskipun platform digital menjadi sumber informasi utama, ia juga menjadi ladang subur bagi hoaks, disinformasi, dan konten provokatif yang dapat merusak kualitas pemahaman politik. (Zaman et al., 2024) mengidentifikasi fenomena filter bubble sebagai salah satu ancaman terbesar, di mana algoritma media sosial secara otomatis membatasi paparan pengguna hanya pada informasi yang sesuai dengan preferensi mereka. Akibatnya, Generasi Z cenderung terperangkap dalam ruang gema (*echo chamber*) yang memperkuat pandangan yang sudah ada, alih-alih mendorong pemikiran kritis yang terbuka.

Dalam konteks yang lebih luas, (Dan et al., 2024) mengidentifikasi lima tantangan utama dalam melestarikan nilai-nilai Demokrasi Pancasila di kalangan Generasi Z: pengaruh teknologi dan media sosial yang mengikis rasa gotong royong, rendahnya partisipasi politik formal, ancaman radikalisasi dan intoleransi di ruang digital, kurangnya pemahaman mendalam tentang Pancasila, serta pengaruh budaya asing yang membawa nilai-nilai individualistis dan materialistis. Kelima tantangan ini saling terkait dan memperkuat satu sama lain, membentuk kompleksitas yang memerlukan respons yang holistik dan terencana.

(Indonesia & Dan, 2009) dalam kajiannya tentang e-demokrasi di Indonesia mengingatkan bahwa hambatan terhadap partisipasi politik tidak semata-mata bersifat teknologis, melainkan juga menyangkut dimensi budaya birokrasi, kesenjangan digital, dan kesiapan kelembagaan. Meskipun kajian tersebut ditulis dalam konteks awal implementasi e-government, relevansinya tetap terjaga hingga saat ini: bahwa teknologi informasi hanyalah alat, sementara substansi demokrasi terletak pada kualitas keterlibatan manusianya.

E-Demokrasi sebagai Peluang Strategis

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebenarnya membuka peluang yang sangat besar bagi penguatan partisipasi politik di era digital. Konsep e-demokrasi, yang dipahami sebagai pemanfaatan TIK untuk memfasilitasi dan meningkatkan proses demokrasi, menawarkan berbagai inovasi seperti e-voting, e-konsultasi, e-forum, e-petisi, dan berbagai bentuk keterlibatan warga secara daring (Indonesia & Dan, 2009). Bagi Generasi Z yang sudah terbiasa dengan ekosistem digital, mekanisme-mekanisme ini berpotensi menjadi pintu masuk yang efektif menuju partisipasi politik yang lebih bermakna.

Namun demikian, implementasi e-demokrasi bukan tanpa risiko. Keberhasilannya sangat bergantung pada kematangan infrastruktur teknologi, keberadaan identitas digital warga negara yang valid, kesiapan kelembagaan, serta tingkat literasi digital masyarakat. Pengalaman Indonesia dalam implementasi e-government menunjukkan bahwa lompatan menuju tahapan transformasi tidak bisa dilakukan secara prematur tanpa mempersiapkan kondisi-kondisi tersebut secara memadai. Oleh karena itu, pemanfaatan TIK dalam konteks demokrasi perlu dibarengi dengan penguatan kapasitas manusia, bukan semata-mata investasi infrastruktur.

Peluang yang ada pada platform digital juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai Demokrasi Pancasila kepada Generasi Z secara lebih kreatif dan mengena. Konten edukatif yang dikemas dalam format video pendek, infografis, atau simulasi interaktif berpotensi menjangkau Generasi Z jauh lebih efektif dibandingkan metode konvensional. Pendekatan ini selaras dengan karakteristik Generasi Z yang menginginkan informasi yang cepat, visual, dan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Pendidikan Politik dan Penguatan Identitas Nasional sebagai Instrumen Penguatan Demokrasi

(Faslah, 2024) Menjelaskan bahwa penguatan identitas nasional menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial perlu diimplementasikan secara nyata dalam praktik demokrasi. (Penelitian et al., n.d.) juga menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam negara demokrasi. Tanpa fondasi literasi politik yang kuat, keterlibatan Generasi Z dalam proses demokrasi berisiko bersifat dangkal dan mudah dimanipulasi.

(Dan et al., 2024) merumuskan beberapa strategi konkret untuk melestarikan nilai Demokrasi Pancasila di kalangan Generasi Z. Pertama, integrasi pendidikan karakter berbasis Pancasila ke dalam kurikulum sekolah, termasuk melalui kegiatan seperti simulasi musyawarah, debat, dan program pengabdian masyarakat. Kedua, pemanfaatan media sosial dan teknologi secara konstruktif untuk menyampaikan nilai-nilai kebangsaan dalam format yang menarik dan mudah diakses. Ketiga, penyelenggaraan festival budaya yang memperkuat rasa persatuan dan keberagaman. Keempat, keikutsertaan dalam organisasi kemahasiswaan sebagai laboratorium berdemokrasi secara langsung.

(Zaman et al., 2024) menambahkan bahwa penguatan literasi media menjadi komponen yang tidak terpisahkan dari pendidikan politik di era digital. Generasi Z perlu dibekali kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi yang mereka terima melalui berbagai platform. Kemampuan ini tidak hanya berguna untuk menghindari jebakan hoaks dan disinformasi, tetapi juga untuk membangun pandangan politik yang lebih matang, kritis, dan berimbang.

Dalam perspektif yang lebih institusional, (Penelitian et al., n.d.) menekankan pentingnya kolaborasi antara tiga pilar utama: sekolah dan perguruan tinggi sebagai tempat internalisasi nilai, pemerintah sebagai penyelenggara dan regulator proses politik, serta partai politik sebagai jembatan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan publik. Ketika ketiga pilar ini bekerja secara sinergis dengan orientasi yang jelas pada kepentingan Generasi Z, maka kemungkinan terbangunnya ekosistem demokrasi yang lebih sehat dan partisipatif akan semakin besar.

Kesimpulan dan Saran

Kajian ini menunjukkan bahwa hubungan antara Demokrasi Pancasila dan partisipasi politik Generasi Z bersifat kompleks, dinamis, dan penuh tegangan. Di satu sisi, nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial menyediakan kerangka normatif yang kuat untuk mendorong keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik. Di sisi lain, Generasi Z sebagai kelompok yang tumbuh dalam ekosistem digital menghadapi tantangan struktural yang cukup berat, mulai dari apatisme politik, pengaruh buruk media sosial, filter bubble, hingga kurangnya pemahaman yang memadai tentang nilai-nilai kebangsaan.

Meskipun demikian, terdapat peluang strategis yang tidak bisa diabaikan. Besarnya proporsi Generasi Z dalam struktur demografis pemilih Indonesia, dikombinasikan dengan kemampuan digital yang mereka miliki, membuka ruang bagi terbangunnya bentuk-bentuk partisipasi politik yang lebih inovatif dan inklusif. Kunci keberhasilan terletak pada kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Demokrasi Pancasila ke dalam ekosistem digital yang sudah menjadi keseharian Generasi Z, serta memastikan bahwa pendidikan politik yang diberikan relevan, menarik, dan mendorong pemikiran kritis.

Daftar Pustaka

- Dan, T., Melestarikan, U., Hafis, M. Al, & Anwari, I. (2024). *Tantangan dan upaya melestarikan nilai-nilai demokrasi pancasila di kalangan gen z*. 2(6), 243–258.
- Faslah, R. (2024). No Title.
- Indonesia, E. D. I., & Dan, A. P. (2009). *E-demokrasi di indonesia, antara peluang dan hambatan pendekatan fenomenologis 1,2&3*. 2009(semnasIF), 85–93.
- Mataram, U., Mutmainnah, N., Mataram, U., Izzati, N., Mataram, U., Mataram, U., Yasmin, W., Mizan, U., Mataram, U., Fiya, Z., Jaelani, A., Mataram, U., & Mataram, U. (2024). *Analisis Partisipasi Politik Generasi Z Pada Pilpres 2024 (Study Di Desa Karang Tapen)*. 5(2).
- Penelitian, J., Pengabdian, D., Penelitian, J., & Pengabdian, D. (n.d.). *SEMAYO : SEMAYO : 3(1)*, 33–42.
- Sarjiyati, S., Jundiani, J., & Hastuti, N. T. (2025). *Desentralisasi asimetris: Model dan praktek otonomi daerah di Indonesia*. PT Mukhlisina Revolution Center. <http://repository.uin-malang.ac.id/24629/>
- Zaman, S. (2023). *Edukasi literasi politik dan media untuk generasi muda: Kesiapan menghadapi tahun politik 2024*. <http://repository.uin-malang.ac.id/14993/>
- Zaman, S. (2023). *Mengatasi populisme politik: Pendekatan demokratis berbasis penyelesaian masalah dan partisipasi publik*. <https://repository.uin-malang.ac.id/14994/>